



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA

Aktualisasi *spirit of collaboration* dalam
peningkatan pengembangan usaha
perhutanan sosial

2023



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA

Aktualisasi *spirit of collaboration* dalam
peningkatan pengembangan usaha
perhutanan sosial

2023

LAPORAN KINERJA 2023

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Disusun oleh
Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
dan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi tingginya kepada pihak-pihak berikut ini
yang telah menyumbangkan pikiran untuk menghiasi
Laporan Kinerja ini. Mereka adalah:

Pengarah
Catur Endah Prasetyani P

Penanggung Jawab
Danang Kuncara Sakti
Nurhasni
Sri Rejeki

Penyusun
Agung Widadi Munandar
Yussi Nadia
Priyo Suprayogi
Adhi Nugroho Windu Agus
Mustofa Bisri
Sri Chairi Mulyani
Nabiila Ibadurrohman
Bhagas Van Salman Okpar
Nugraha
Rizkia Febriani
Annieke Stevani
Muhammad Hafidz
Aldi Vandista
Anisa Nareswari

Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:
http://bit.ly/LKI_DITPUPS2023

©copyright Direktorat PUPS 2024



A photograph of two women working in a forest clearing. The woman on the left is wearing a blue long-sleeved shirt, patterned pants, and a large traditional conical hat. She is bent over, using a hoe to dig in the soil, and holding a metal bucket filled with brown soil or organic matter. The woman on the right is wearing a pink hijab, a black jacket over a grey shirt, and purple pants. She is kneeling on the ground, holding a dark bucket. The background consists of many thin, light-colored tree trunks and some green foliage, suggesting a forest environment. The ground is covered with dry leaves and some green grass.

Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas, mulai dari hutan konservasi, taman nasional hingga hutan rakyat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bersinergi untuk menjaga, merawat hingga memanfaatkan lahan di kawasan hutan.

Salah satunya adalah sistem tumpang sari di kawasan hutan Wana Husada Playen, Gunungkidul, Yogyakarta. Pada musim penghujan, warga mulai memanfaatkan lahan dengan menanam budi daya empon-empon di kawasan hutan kayu putih.

Berbagai macam tanaman diantaranya adalah tanaman empon-empon mulai dari jahe, sere, kencur, temulawak, laos dan rempah lainnya yang ditanam diantara sela-sela pohon kayu putih yang memiliki luas kurang lebih 600 hektar.

Oleh Eko Kintoko Kusumo

KATA PENGANTAR



Aktualisasi *spirit of collaboration* dalam peningkatan pengembangan usaha perhutanan sosial

Fokus Kementerian LHK di Tahun 2023 merupakan penegasan konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi program dan dampak pembangunan. Dalam implementasi kegiatan perhutanan sosial dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang menjalankan Program Perhutanan Sosial. Pada Tahun 2023 menjadi aksi Aktualisasi *spirit of collaboration* dalam peningkatan pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai kerja nyata implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial memiliki tugas mulia dalam membantu kesejahteraan

Masyarakat melalui pengembangan usaha pada lokasi perhutanan sosial. Untuk mendukung kegiatan tersebut, kegiatan utama yang harus dikawal melalui Rencana kerja/ pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum, Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan, dan Fasilitas Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Tahun 2023 telah menorehkan kinerja yang baik dengan seluruh capaian kinerja yang mencapai target bahkan mengalami peningkatan yang signifikan dengan aktualisasi *spirit of collaboration*, bukti tersebut tersaji dalam laporan kinerja ini. Kinerja yang baik ini dapat diartikan bahwa pengembangan usaha perhutanan sosial sudah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut untuk kinerja yang lebih efisien dan akuntabel.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Direktorat PUPS) Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban seluruh jajaran Direktorat PUPS atas mandat negara dalam mengembangkan tugas Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 2020-2024.

Capaian berbagai target dan sasaran Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial tahun 2023 sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik, dan semoga ke depan Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial terus mengalami peningkatan dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menunjang kelestarian Sumber Daya Hutan.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PUPS Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup khususnya Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 16 Januari 2024

Direktur PUPS,



Catur Endah Prasetyani P, S.Si., M.T.
NIP. 19690224 199403 2 003

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

01

- 2 PENDAHULUAN
- 3 TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT PUPS
- 4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN
STRUKTUR ORGANISASI

PERENCANAAN KINERJA

02

- 10 PERENCANAAN KINERJA
- 11 RENCANA STRATEGIS
2020-2024
- 13 RENCANA KERJA
2023

CAPAIAN KINERJA

18

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

19

REALISASI ANGGARAN

31

AKUNTABILITAS KINERJA

03

PENUTUP

CATATAN PENUTUP

38

04

PENDAHULUAN

Seorang petani kopi memetik biji kopi di Kalibening, Temanggung, Jawa Tengah. Selain didominasi pohon karet, dikawasan ini juga ditanami kopi robusta dengan kualitas unggul.
Oleh Fitria Nuraini



Kolaborasi merupakan kunci keberhasilan pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2023 disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir TA 2022 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Sasaran kebijakan dan strategi program perhutanan sosial dalam Rencana Kerja Tahun 2023 adalah meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat dan

meningkatnya jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan yang diharapkan memberikan dampak terhadap penurunan laju penyusutan hutan, peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan kegiatan program perhutanan sosial khususnya kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial. Tantangan terbesar adalah memastikan kegiatan pengembangan usaha dapat berlangsung secara berkelanjutan dilakukan setelah KUPS mendapatkan ijin mulai dari aspek kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. Selain itu untuk memastikan perubahan cara berpikir subsisten dan tradisional serta orientasi terhadap bisnis yang masih rendah menjadi masyarakat yang memiliki orientasi pengelolaan hutan lestari dan usaha bisnis yang berbasis sumberdaya hutan berkelanjutan.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk meningkatkan kinerja

pengembangan usaha perhutanan sosial melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan kelompok usaha perhutanan sosial. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) terus melakukan inovasi, kreatifitas dan juga kerja sama kepada para pihak dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pada kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial. Inovasi tersebut menjadi **Isu Strategis** Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial antara lain: Digitalisasi RKPS, Penghitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NEKON) Perhutanan sosial melalui Aplikasi GoKUPS, temu inovasi (proper), dan pembentukan *Integrated Area Development* (IAD).

Dengan inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial tersebut dapat terwujud peningkatan kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PUPS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat berubah menjadi Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Direktorat PUPS

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial mempunyai **tugas** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial.

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial menyelenggarakan **fungsi**:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Subdirektorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial.

Subdirektorat Kewirausahaan Usaha Perhutanan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produktifitas dan kualitas produk penguatan kewirausahaan perhutanan sosial.

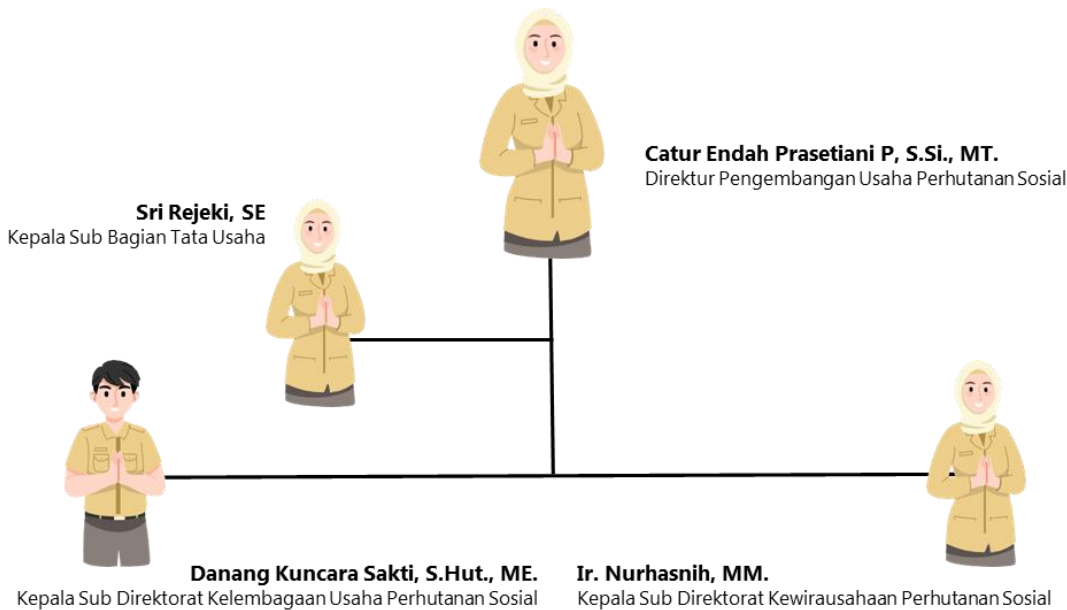
Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

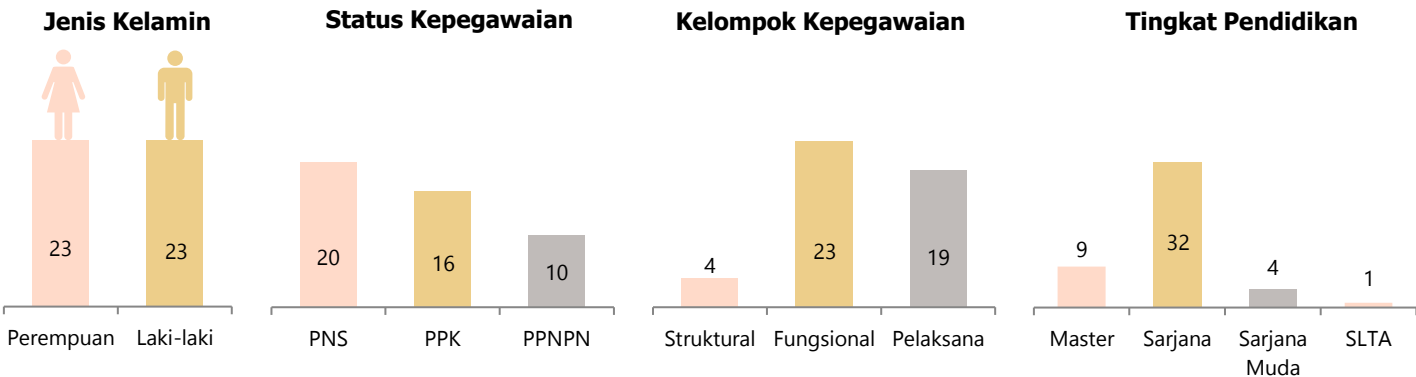
SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

dibantu oleh Subdirektorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial, Subdirektorat Kewirausahaan Perhutanan Sosial, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Pada Tahun 2023 jumlah keseluruhan pegawai Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah sebanyak 46 pegawai, data sebagai berikut



“
Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial memiliki tim kelompok kerja untuk membantu percepatan kinerja direktorat melalui Surat Keputusan Direktur No.22/Dit.PUPS/2022 tentang Kelompok Kerja Sub Direktorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial dan Sub Direktorat Kewirausahaan Perhutanan Sosial. Pada Sub Direktorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial terdapat kelompok kerja inisiasi IAD berbasis perhutanan sosial dan kelompok data dan informasi perhutanan sosial. Sedangkan pada Sub Direktorat Kewirausahaan Perhutanan Sosial terdapat kelompok kerja Kerjasama Usaha Perhutanan Sosial dan kelompok kerja dukungan para pihak.

Dokumentasi Oleh Sri Chairi Mulyani



Launching dan Pengesahan

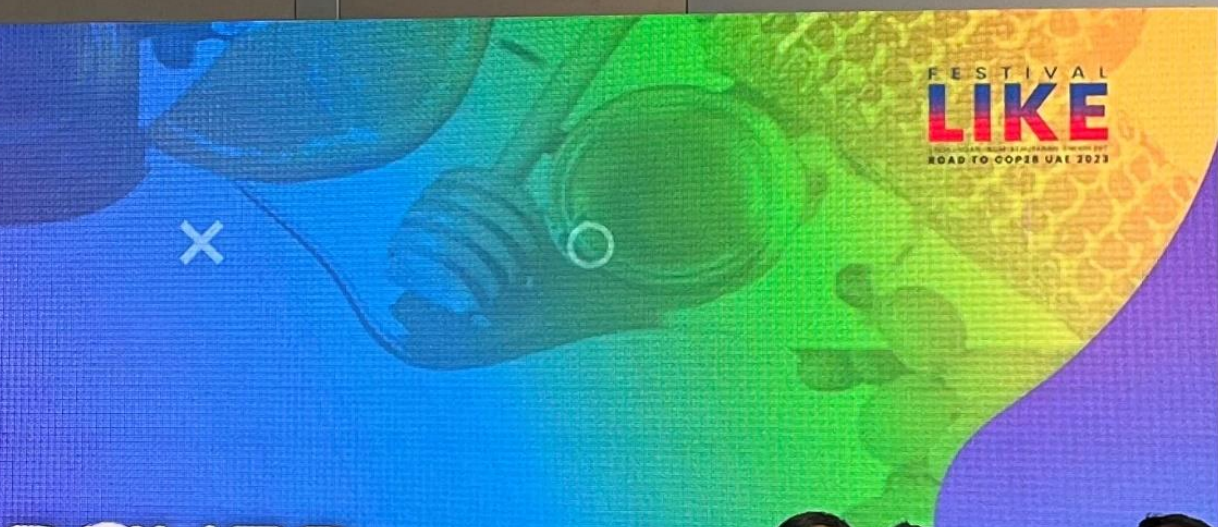
MASTERPLAN INTEGRATED AREA DEVELOPMENT KABUPATEN ENREKANG DAN KABUPATEN MAROS

Rabu, 18 November 2020
Novotel Grand Shyria
Makassar



Tim PUPS membantu menyukseskan Festival LIKE 2023 dengan menyelenggarakan workshop Seller Meet Buyer Oleh Mustofa Bisri





PERENCANAAN KINERJA

Indonesia mempunyai produk madu hutan unggulan, dari spesies lebah besar atau lebah liar bernama Apis Dorsata. Biasa ditemukan di dalam hutan dan memproduksi madu berkualitas. Di Hutan Lembah Aliran Curug Cimahi menjadi tempat terbaik bagi para lebah Apis Dorsata membuat sarangnya, Oleh Ganjar Mustika

02

Tata Kelola Kinerja menjadi formula pengembangan usaha perhutanan sosial yang lebih baik

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2020–2024, terdapat 2 sasaran kegiatan, antara lain a) Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan perhutanan sosial dan b) Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri dengan didukung dengan indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan, yang tersaji pada gambar dibawah.

Rencana Strategi Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 2020–2024 disusun sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan

kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial untuk mendukung seluruh kegiatan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan pembangunan KLHK yang lebih baik.

Rencana Kerja merupakan turunan rencana strategis. Rencana Kerja Direktorat PUPS 2023 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Pada tahun 2023, Direktorat PUPS akan melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sasaran

program meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal PSKL. Terdapat 5 Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain 1). Rencana kerja/ pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan, 2). Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum, 3). Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan, 4). Fasilitas Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, dan 5) *Community Focused Investment to address deforestation and forest degradation Forest Investment Program I (FIP I)*.





Dokumen
Renstra Dit. PUPS
2020-2024



RENCANA STRATEGIS DIT. PUPS 2020-2024

Hasil refleksi kinerja, kinerja KLHK 2023 merupakan penegasan konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi program dan dampak pembangunan.

IKK 1. Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan sebanyak **282 dokumen**

IKK 2. Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan sebanyak **1,516 paket**

IKK 3. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum sebanyak **61 kelas**

IKK.4 Fasilitas Pengembangan Usaha PS sebanyak **3 dokumen**

IKK 1. Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan sebanyak **300 dokumen**

IKK 2. Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan sebanyak **1,278 paket**

IKK 3. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum sebanyak **55 kelas**

IKK.4 Fasilitas Pengembangan Usaha PS sebanyak **3 dokumen**

2021

2020

2024

- IKK 1.** Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan sebanyak **500 dokumen**
- IKK 2.** Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan sebanyak **2,200 paket**
- IKK 3.** Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum sebanyak **420 kelas**
- IKK.4** Fasilitas Pengembangan Usaha PS sebanyak **3 dokumen**

2023

- IKK 1.** Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan sebanyak **571 dokumen**
- IKK 2.** Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan sebanyak **2,226 paket**
- IKK 3.** Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum sebanyak **429 kelas**
- IKK.4** Fasilitas Pengembangan Usaha PS sebanyak **3 dokumen**

2022

- IKK 1.** Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan sebanyak **347 dokumen**
- IKK 2.** Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan sebanyak **850 paket**
- IKK 3.** Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum sebanyak **42 kelas**
- IKK.4** Fasilitas Pengembangan Usaha PS sebanyak **3 dokumen**



RENCANA KERJA PUPS 2023

Dalam mendorong pencapaian sasaran program dimaksud, Direktorat PUPS dengan dibantu oleh Balai PSKL di seluruh Indonesia menetapkan sasaran dari kegiatan tahun 2023 dengan total anggaran sebesar **Rp 46.368.574.000,-** seperti pada Tabel berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Target	Pagu
Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan perhutanan sosial	Rencana kerja/ pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	304 Kelompok Masyarakat	200.000.000
Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	27 Kelompok Masyarakat	1.051.741.000
	Fasilitasi peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	590 Kelompok Masyarakat	31.676.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3 Kelompok Masyarakat	700.000.000
	<i>Community Focused Investment to address deforestation and forest degradation Forest Investment Program I (FIP I)</i>	1 Dokumen	12.740.833.000

*Keterangan : Output kinerja Diredotrat PUPS dilakukan bersama dengan Balai PSKL.
Direktorat PUPS memiliki fungsi pembinaan dan supervisi.

Dalam pelaksanaan menuju pencapaian output tersebut, Direktorat PUPS dibantu oleh Balai PSKL yang tersebar di 5 (lima) wilayah antara lain BPSKL Wilayah Sumatera, BPSKL

Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, BPSKL Wilayah Kalimantan, BPSKL Wilayah Sulawesi dan BPSKL Wilayah Maluku Papua.

Tabel berikut ini merupakan rincian kegiatan Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh seluruh BPSKL pada Tahun 2023,

No	Output	Target	BPSKL Sumatera	BPSKL Jawa	BPSKL Bali Nusra	BPSKL Kalimantan	BPSKL Sulawesi	BPSKL Maluku papua
1	Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan (Dokumen)	304	62	22	65	47	61	47
2	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/ Platinum (kelas)	27	7	4	3	5	5	3
3	Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan (paket)							
	a. Alat Ekonomi Produktif	50	10	5	5	10	10	10
	b. Bang PeSoNa	590	-	-	-	-	-	-





RUMAH PRODUKSI LPHD LAMPO



LPHD Lampo merupakan juara terbaik ke-III pemenang
wana lestari kategori hutan desa
Oleh Nabiila Ibadurrohman

AKUNTABILITAS KINERJA

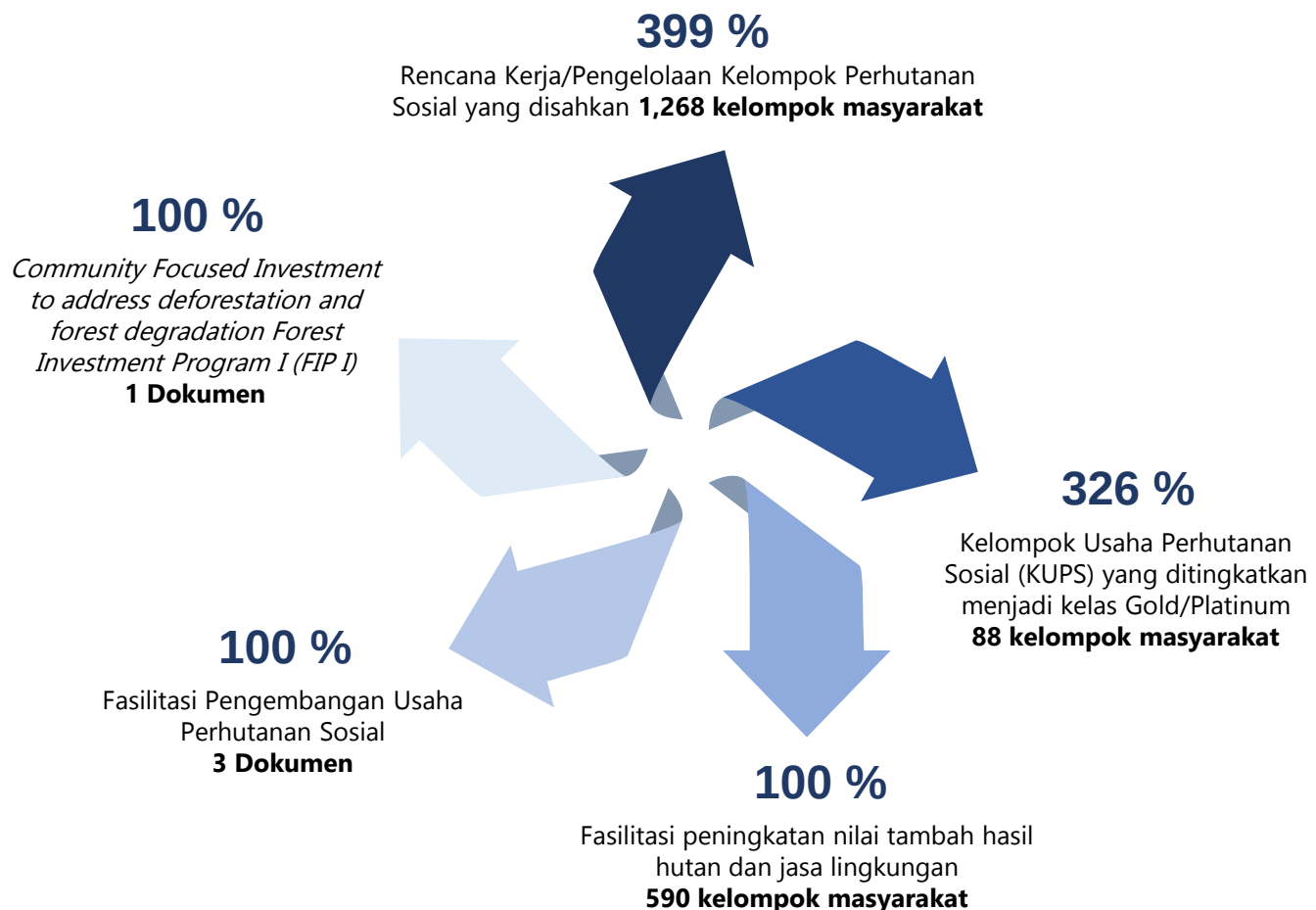
Alam menghasilkan oksigen sebagai energi kehidupan manusia, hutan yang mengelilingi pegunungan kaki Meratus ini menampung banyak kehidupan didalamnya.
Oleh Siti Maemunah

03

Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 2023

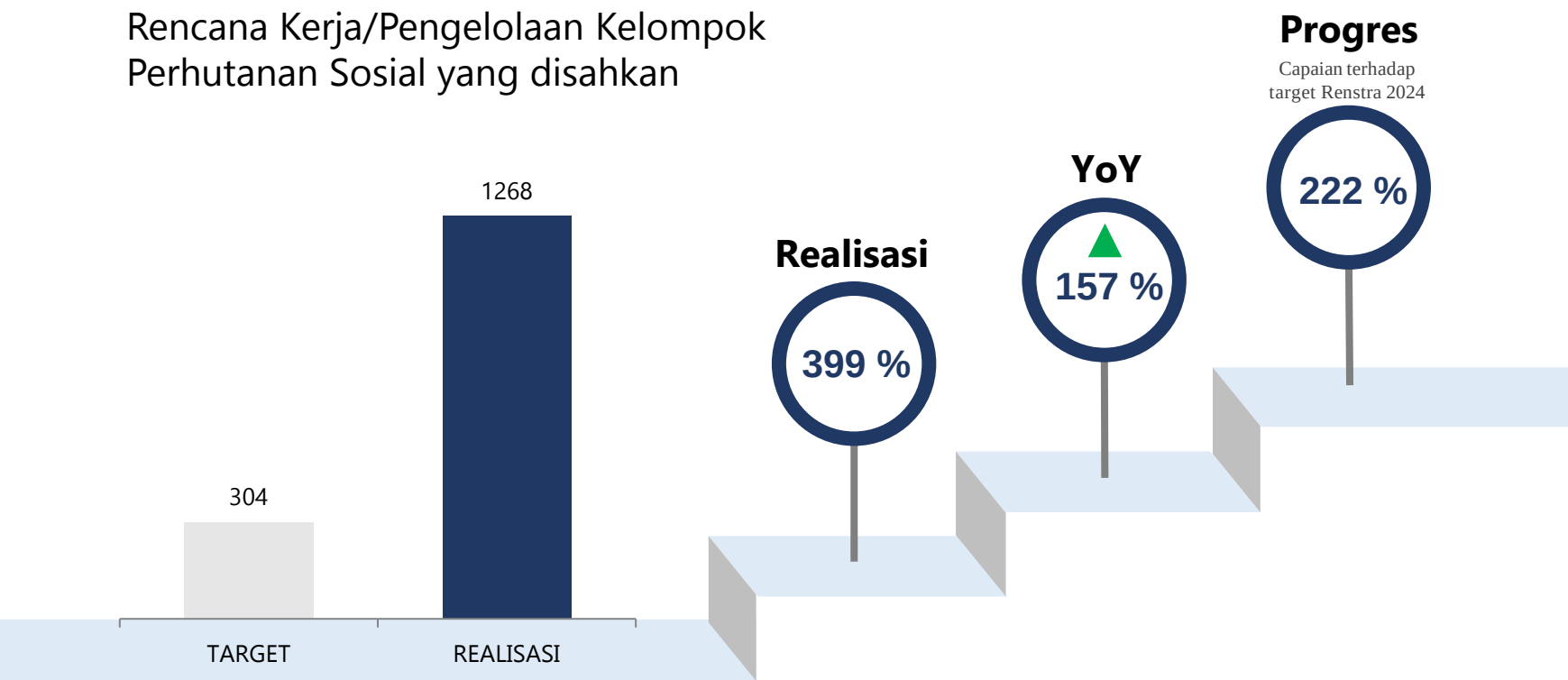
SASARAN KEGIATAN dari kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2023 yaitu a) Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan perhutanan sosial dan b) Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut melalui 5 output antara lain Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang disahkan dengan target 304 kelompok masyarakat, Kelompok Usaha

Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum dengan target 27 kelompok masyarakat, Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan dengan target 590 kelompok masyarakat, Fasilitas Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan target 3 dokumen, dan *Community Focused Investment to address deforestation and forest degradation Forest Investment Program I (FIP I)* dengan target 1 dokumen.



IKK 1

Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang disahkan



*Adanya Dukungan Anggaran dari Non APBN

No	Balai PSKL	Penyusunan RKPS		
		Target	Realisasi	%
1	BPSKL Sumatera	62	570	919%
2	BPSKL Jawa	22	71	323%
3	BPSKL Bali Nusra	65	172	265%
4	BPSKL Kalimantan	47	149	317%
5	BPSKL Sulawesi	61	165	270%
6	BPSKL Maluku Papua	47	141	300%
Total		304	1.268	399%

Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah rencana yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi.

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/KPS yang telah mendapatkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diharapkan mampu mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan potensi yang ada pada wilayah areal kelolanya. Untuk itu perlu adanya suatu rencana kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi kelompok KPS yaitu dengan Menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang berlaku selama 10 tahun dan Rencana Kerja Tahunan yang berlaku selama 1 tahun. KPS wajib melakukan Penyusunan RKPS dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Oleh karena itu, penyusunan RKPS dan RKT menjadi output kinerja dalam fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial dalam hal penguatan kelembagaan.

Adapun realisasi penyusunan RKPS pada tahun 2023 adalah sebanyak 1,268 dokumen atau 399% dari target 304 dokumen. Target Penyusunan RKPS pada Peraturan Presiden No 28 tahun 2023 adalah sebanyak 1.500 KPS. Percepatan Penyusunan RKPS terus didorong sehingga melebihi target anggaran yang juga didukung oleh anggaran Non APBN seperti anggaran HLN (FP II, FP III, FP V, SSF), GCF Output 1 dan 2.

DIGITALISASI RKPS

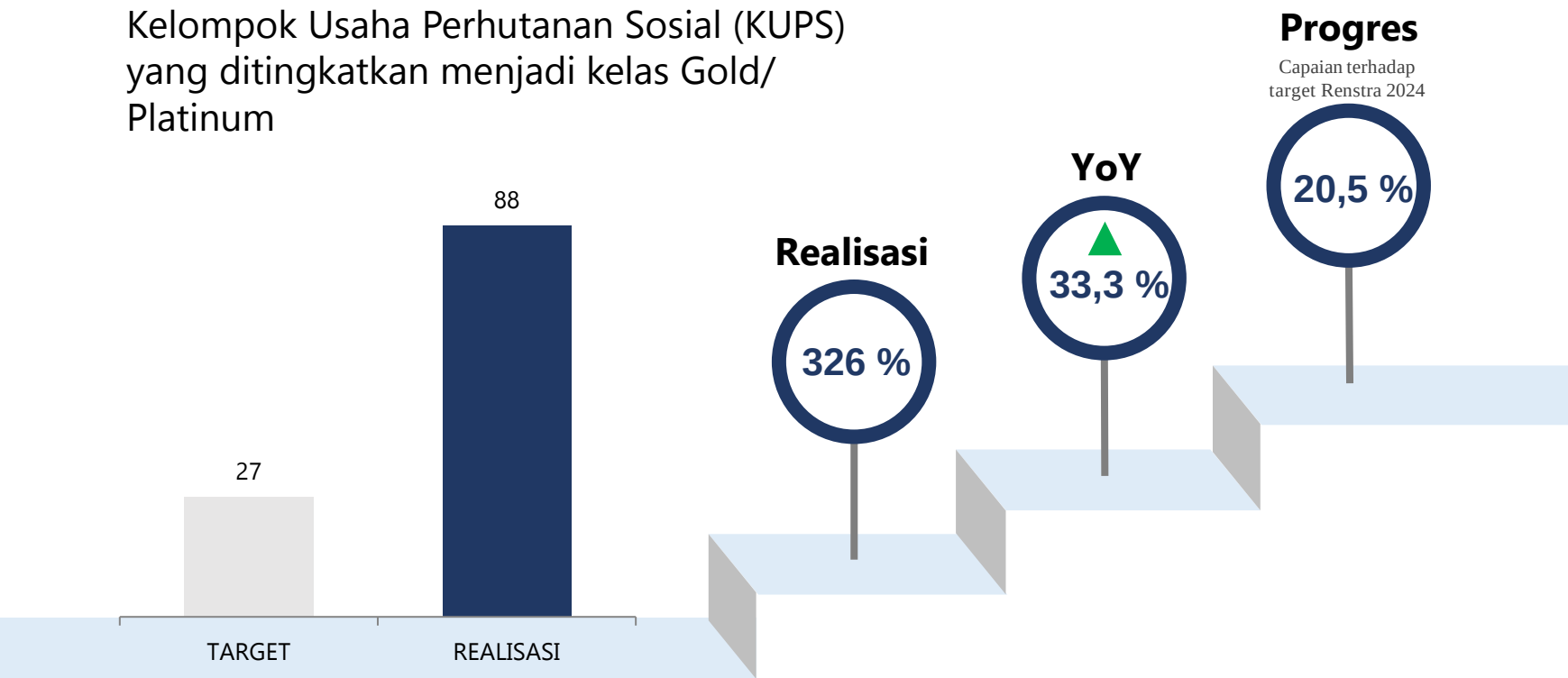
Salah satu cara mempercepat Penyusunan RKPS yaitu melalui digitalisasi RKPS. Digitalisasi Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) merupakan salah satu bagian dari fasilitasi penyusunan Dokumen RKPS berbasis digital untuk memberikan kemudahan dalam upaya percepatan peningkatan kinerja Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial antara lain :

- 1 RKPS digital dapat memudahkan pemegang persetujuan PS dalam input data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- 2 Membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan manajerial
- 3 Mempermudah dan mendukung percepatan penyusunan dan pengesahan RKPS
- 4 Memudahkan monitoring dan evaluasi
- 5 Dapat digunakan untuk proyeksi perhitungan Nilai Intangible

Selain dengan digitalisasi RKPS, percepatan penyusunan RKPS dapat dilaksanakan melalui Pelibatan Tenaga Teknis KPH dalam Penyusunan RKPS, pelibatan aktif pendamping perhutanan sosial serta Kerjasama BUMDes untuk penguatan KUPS.

IKK 2

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/
Platinum

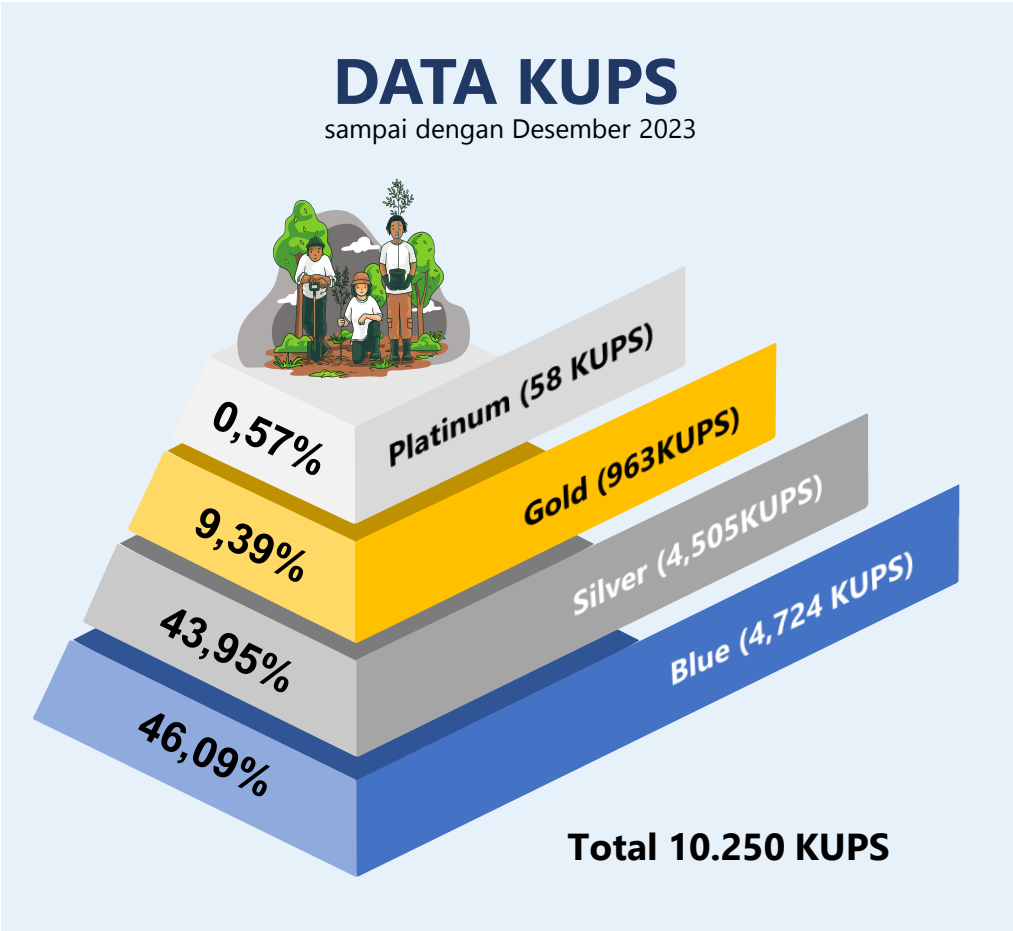


No	Balai PSKL	Peningkatan Kelas		
		Target	Realisasi	%
1	BPSKL Sumatera	7	10	143%
2	BPSKL Jawa	4	4	100%
3	BPSKL Bali Nusra	3	3	100%
4	BPSKL Kalimantan	5	19	380%
5	BPSKL Sulawesi	5	49	980%
6	BPSKL Maluku Papua	3	3	100%
Total		27	88	326%

Realisasi capaian Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terinput pada aplikasi goKUPS sampai dengan Desember 2023 dan telah ditetapkan berdasarkan SK Direktur PUPS Nomor SK.22/PUPS/KUPS/ PSL.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Kelas KUPS adalah sebanyak 10.250 KUPS dengan rincian: i) KUPS Blue : 4.724 KUPS (46,09%); ii) KUPS Silver: 4.505 KUPS (43,95%); iii) KUPS Gold : 963 KUPS (9,39%); iv) Platinum : 58 KUPS (0,57%). **Pada Tahun 2023, kelas platinum meningkat 8 KUPS.**

Salah satu kinerja PUPS dalam fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial adalah Peningkatan Kelas KUPS menjadi kelas Gold/Platinum. Realisasi Capaian Peningkatan Kelas KUPS menjadi Gold/Platinum telah ditetapkan berdasarkan SK Direktur PUPS Nomor SK.23/PUPS/KUPS/PSL.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yaitu sebanyak 88 KUPS dengan rincian 80 KUPS Gold dan 8 KUPS Platinum sesuai dengan tabel disamping.

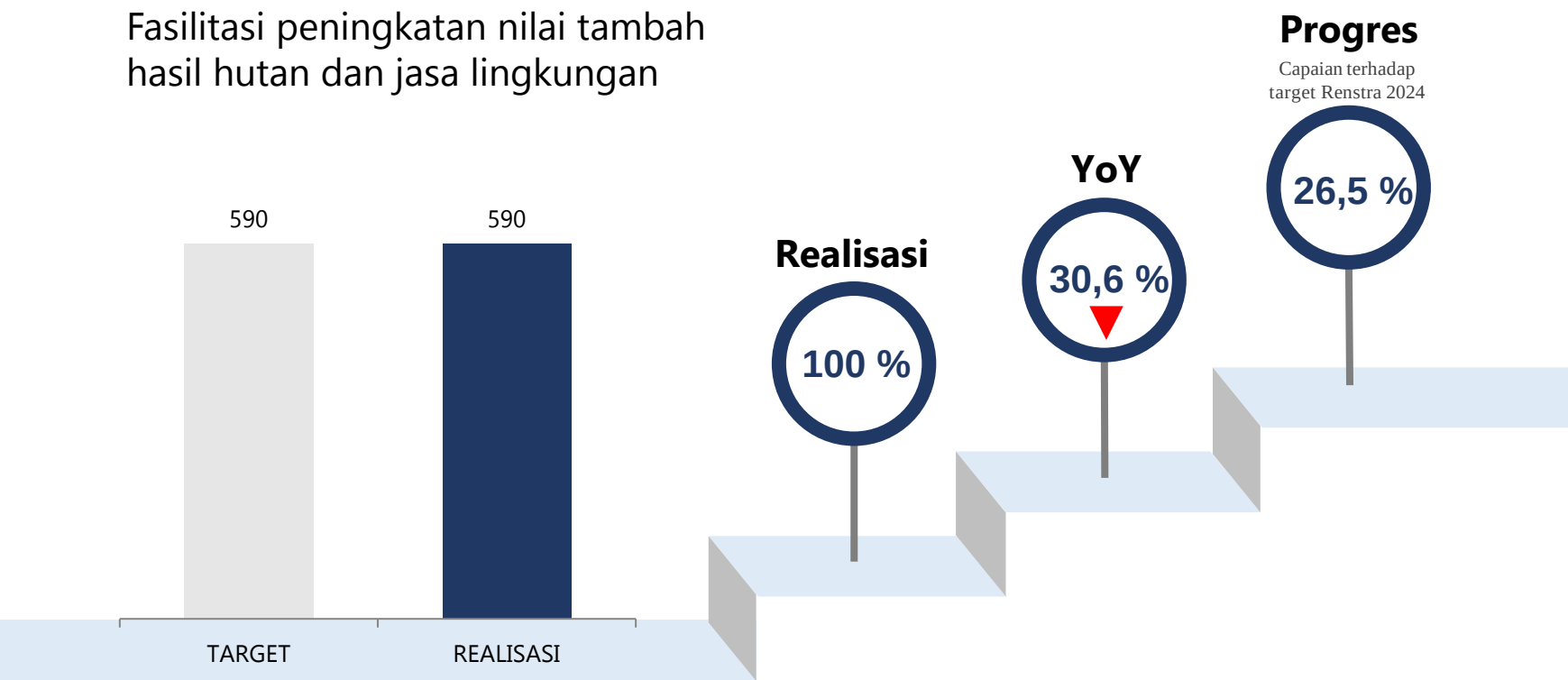
Realisasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/ Platinum pada tahun 2023 adalah sebanyak 88 KUPS dokumen atau 326% dari target 27 KUPS dokumen. Capaian ini lebih kecil dari target di Renstra Direktorat PUPS sebesar 429 KUPS sehingga untuk membantu capaian tersebut dengan anggaran Non APBN serta melalui Kerjasama pengembangan usaha dan *Integrated Area Development* (IAD).



No	Wilayah Kerja	Peingkatan Kelas KUPS Gold	Peingkatan Kelas KUPS Platinum	Jumlah KUPS
1	BPSKL Sumatera	7	3	10
2	BPSKL Jawa	4	-	4
3	BPSKL Bali Nusra	3	-	3
4	BPSKL Kalimantan	14	5	19
5	BPSKL Sulawesi	49	-	49
6	BPSKL Maluku Papua	3	-	3
Total		80	8	88

IKK 3

Fasilitasi peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan



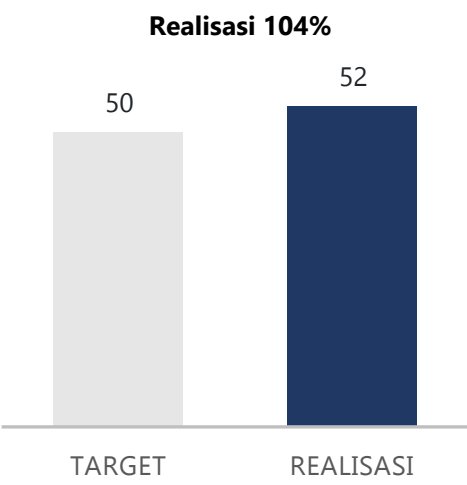
Fasilitasi peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan dicapai melalui penyaluran Bang PeSoNa dan penyaluran Alat Ekonomi Produktif pada KUPS, namun dalam dokumen LKJ ini menggunakan penyaluran Bang PeSoNa sebagai capaian, rincian capaian pada 2023 Sebagai Berikut:

No	Balai PSKL	AEP			Bang PeSoNa		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	BPSKL Sumatera	10	11	110%	108	121	112%
2	BPSKL Jawa	5	5	100%	232	294	127%
3	BPSKL Bali Nusra	5	5	100%	68	47	69%
4	BPSKL Kalimantan	10	10	100%	60	48	80%
5	BPSKL Sulawesi	10	10	100%	66	45	68%
6	BPSKL Maluku Papua	10	11	110%	56	35	63%
Total		50	52	104%	590	590	100%

ALAT EKONOMI PRODUKTIF

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong ekonomi lokal melalui program Perhutanan Sosial. Salah satu upaya mendorong ekonomi lokal yaitu dengan penyaluran bantuan alat ekonomi produktif. Bantuan Alat Ekonomi Produktif diberikan kepada kelompok yang telah memiliki izin perhutanan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok agar lebih produktif dalam mengelola hasil hutan bukan kayu dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Renja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2023 sebesar 50 bantuan, realisasi Tahun 2023 sebesar 52 bantuan (104%) dan seluruh balai menyalurkan alat ekonomi produktif sesuai target. Alat ekonomi produktif yang disalurkan melalui BPSKL bermacam-macam sesuai dengan keperluan KUPS, Sebagian besar berupa mesin pengolahan kopi, mesin pengemas produk, genset, dan alat lainnya yang mendukung kegiatan produksi hasil hutan bukan kayu dan ekowisata perhutanan sosial.

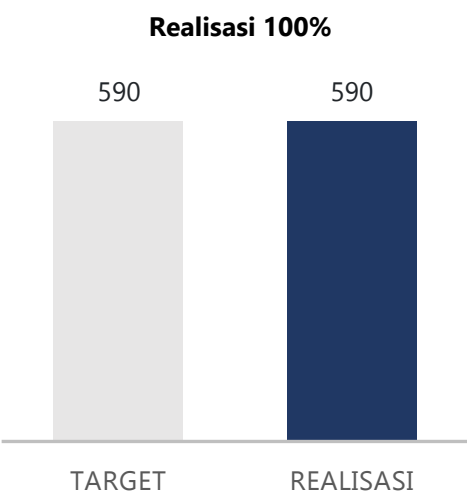


BANG PESONA

Bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang PeSoNa) merupakan gerakan ekonomi produktif dan pengembangan usaha perhutanan sosial untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat perdesaan. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong agar masyarakat bisa menjalankan usaha Perhutanan Sosial hingga memberikan nilai tambah bagi produk.

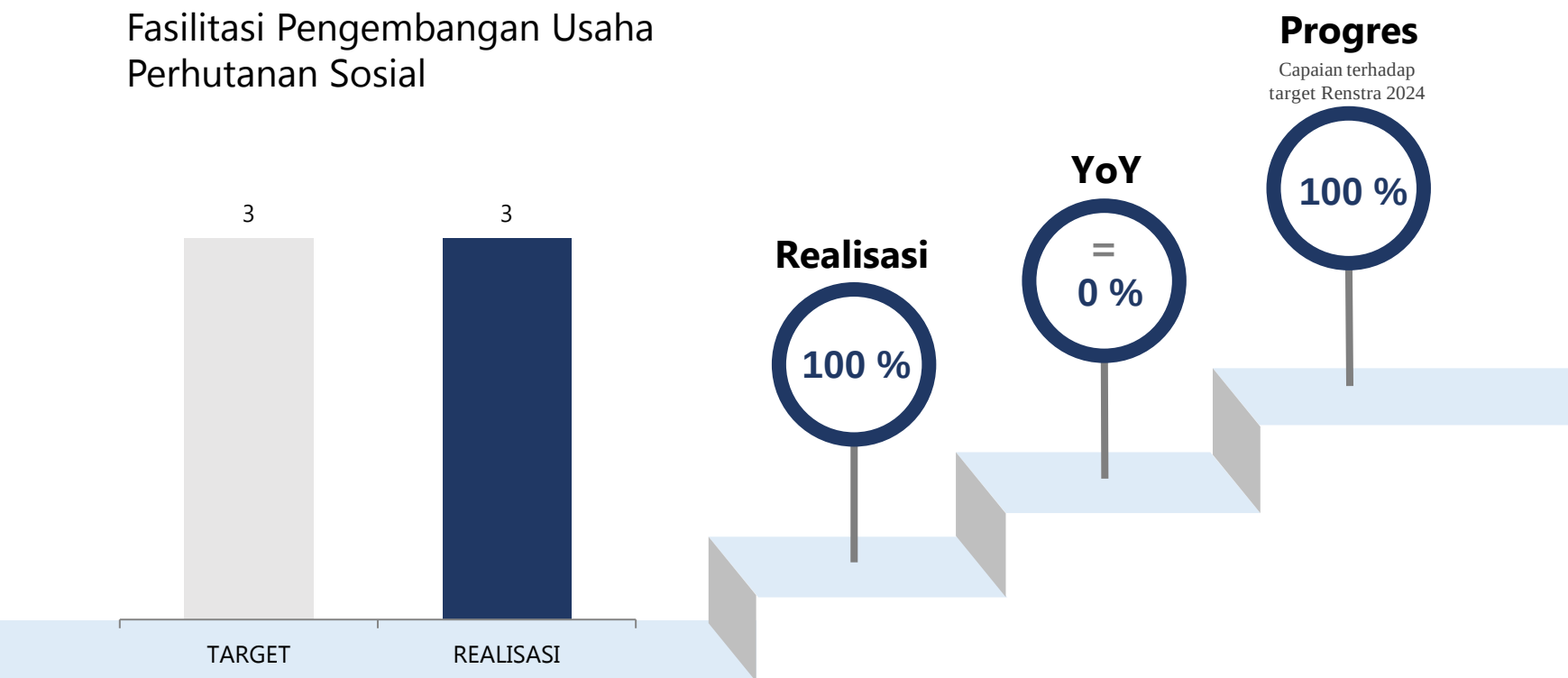
Pemberian Bang PeSoNa dimulai dari pengajuan proposal oleh ketua kelompok masyarakat kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Selanjutnya terhadap proposal dimaksud dilakukan verifikasi administrasi, apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, dilanjutkan dengan verifikasi teknis untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi lapangan. Dalam hal telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, pemberian Bang PeSoNa dilakukan langsung ke rekening kelompok.

Dalam Renja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2023 sebesar 590 bantuan, realisasi Tahun 2023 sebesar 590 bantuan (100%) realisasi seluruh balai bermacam-macam, realisasi tertinggi berada pada BPSKL Sumatera dan BPSKL Jawa. Bang PeSoNa yang disalurkan oleh balai berupa bantuan bibit dan peternakan penunjang kegiatan perhutanan sosial.



IKK 4

Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial



Capaian Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial melalui penyusunan dokumen layanan internal seperti dokumen rencana kerja, laporan kinerja, dan rencana strategis, selain itu capaian pada kegiatan ini termasuk dukungan kegiatan implementasi *Integrated Area Development* (IAD) serta perhitungan nilai ekonomi perhutanan sosial.

KLHK mendapat mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk implementasi *Integrated Area Development* (IAD), sesuai perpres tersebut Tahun 2023 target total 3 lokasi IAD. Pelaksanaan inisiasi *Integrated Area Development* (IAD) KLHK dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

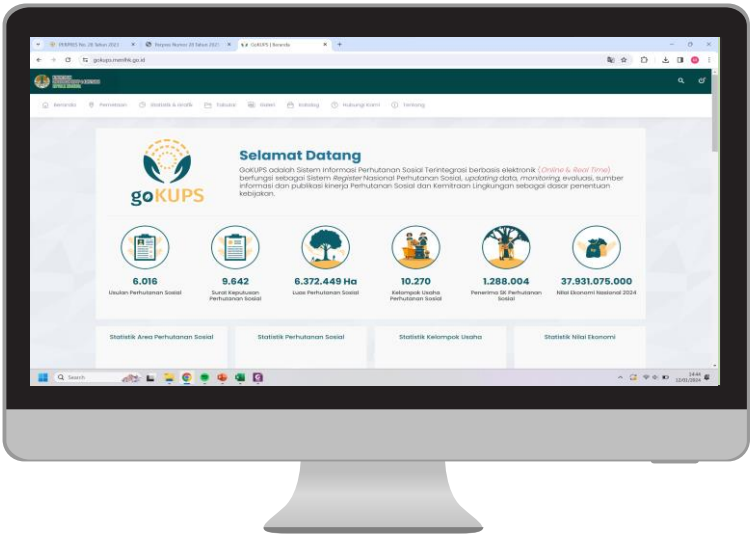
Dalam dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Tahun 2023 menargetkan nilai ekonomi perhutanan sosial sebesar 1,1 Triliun rupiah. Nilai ekonomi perhutanan sosial merupakan turunan dari kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sehingga menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

Realisasi kinerja tahun 2023, capaian rencana aksi IAD sebesar 300% atau 9 dokumen dari target 3 dokumen yang direncanakan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023, sedangkan capaian nilai ekonomi perhutanan sosial sebesar 102,7 % atau sebesar 1,13 triliun rupiah dari target sebesar 1,1 Triliun rupiah yang ada dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024.

NILAI EKONOMI PERHUTANAN SOSIAL

NEKON adalah pendataan secara digital untuk perhitungan Nilai Ekonomi KPS berbasis komoditas yang diusahakan oleh kelompok. Pendataan Nilai Ekonomi (NEKON) Perhutanan Sosial dilaksanakan guna mengetahui kontribusi pemberian akses kelola perhutanan sosial terhadap peningkatan nilai ekonomi masyarakat yang berbasis data komoditas yang telah diusahakan oleh kelompok perhutanan sosial.

Pengisian data NEKON dilakukan secara digital melalui website goKUPS yang dapat diakses pada laman <https://gokups.menlhk.go.id/>



REALISASI CAPAIAN NEKON S/D DES 2023 PER BALAI PSKL

NO	BALAI	KUPS	INPUT KUPS	%	TARGET TAHUN 2023 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp.)
1	BPSKL Sumatera	3.024	241	7,97%	299.119.190.405	542.215.920.673
2	BPSKL Jawa	1.406	72	5,12%	145.952.023.988	Rp156.942.132.700
3	BPSKL Bali & Nusa Tenggara	1.023	153	14,96%	85.963.268.366	169.784.639.459
4	BPSKL Kalimantan	1.832	193	10,53%	211.094.452.774	Rp262.258.369.659
5	BPSKL Sulawesi	2.290	365	15,94%	302.005.247.376	50.327.094.780
6	BPSKL Maluku Papua	862	61	7,08%	55.865.817.091	Rp6.642.021.000
TOTAL :		10.437	1.085	10,40%	1.100.000.000.000	1.188.170.178.271

Total capaian Nilai Ekonomi Perhutanan Sosial berasal dari realisasi capaian Nilai Ekonomi pada setiap balai yang terekap dalam GoKUPS Tahun 2023 sebesar **Rp 1.188.170.178.271**.

Integrated Area Development (IAD)

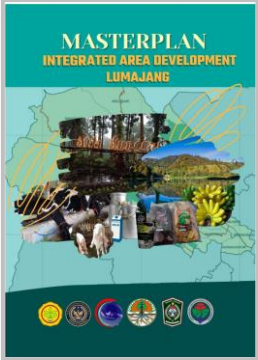
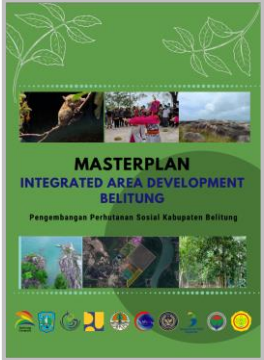
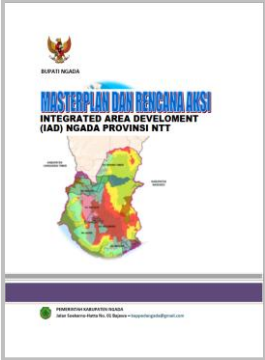
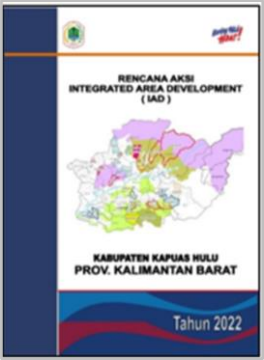
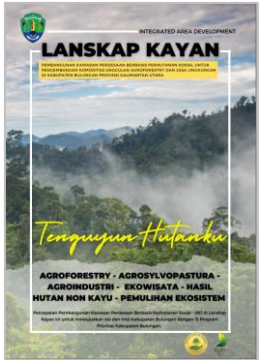
IAD merupakan integrasi/kolaborasi program Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Aksi yang disusun dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah. IAD sebagai salah satu strategi pendekatan perhutanan sosial yang terintegrasi tidak hanya dari segi sosial, melainkan juga ekonomi dan ekologinya dengan melibatkan para pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, LSM/NGO, Akademisi, Swasta dan Media (Pentahelix).

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan pihak terkait.

Rencana Implementasi IAD sudah dimulai dari sejak tahun 2022 dengan target 20 Kabupaten dan baru 3 Kabupaten yang sudah disahkan dokumen Rencana Aksinya yaitu : Lumajang, Belitung, dan Ngada. Untuk tahun 2023, target 3 dokumen yang disahkan, namun pada capaian totalnya terdapat 9 Kabupaten yang sudah menandatangani dokumen Rencana Aksinya yaitu Belitung, Lumajang, Ngada, Kapuas Hulu, Sintang, Poso, Maros, Enrekang, dan Bulungan. Serta sudah 43 Kabupaten/Kota yang telah menginisiasi IAD berbasis Perhutanan Sosial seperti pada tabel berikut.

No	Tahapan	Jumlah	Kabupaten/Kota
1	Dokumen renaksi IAD telah disahkan dan diimplementasikan	9 Kab/Kota	2 Kabupaten Tahap Implementasi (Lumajang dan Belitung) 3 Kabupaten Sudah Diseminasi Dok Renaksi IAD Tingkat Nasional (Ngada, Kapuas Hulu, Sintang) 4 Kabupaten Sudah Diseminasi Dok Renaksi IAD Tingkat Daerah (Poso, Maros, Enrekang, Bulungan)
2	Tahap penyusunan dan finalisasi dokumen 10 Renaksi IAD	10 Kab/Kota	Lima Puluh Kota, Lampung Selatan, Ogan Komering Ilir, Buleleng, Lombok Tengah, Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Berau, Halmahera Barat, Timor Tengah Selatan
3	Tahap sosialisasi dokumen Renaksi IAD	24 Kab/Kota	Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Garut, Kulon Progo, Gunung Kidul, Karawang, Madiun, Jembrana, Kutai Kartanegara, Ketapang, Kotawaringin Barat, Balikpapan, Pulang Pisau, Sanggau, Pahuwato, Sigi, Bulukumba, Luwu Utara, Kota Ternate, Halmahera Utara, Sikka, Mimika

Rencana Aksi *Integrated Area Development* (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial Yang Telah Di Sahkan

 “Agroindustri dan Interkoneksi Wisata” Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur	 “Interkoneksi Wisata” Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	 “Tate Nela Paris (Tani, Ternak, Nelayan dan Pelaku Pariwisata)” Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur	 “Kapuas Hulu Hebat” Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat	 “Sintang Lestari” Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
 “Poso Sejahtera” Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah	 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	 Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan	 “Tenguyun Hutanku” Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Sudah ada 9 Kabupaten yang telah mengesahkan rencana aksi IAD

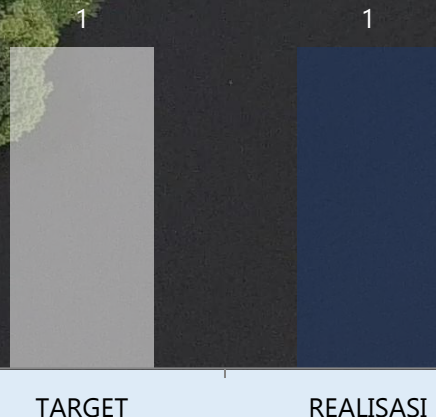


Dokumen
 Renaksi IAD pada 9 Kabupaten



IKK 5

Community Focused Investment to address deforestation and forest degradation Forest Investment Program I (FIP I)



Realisasi

100 %

YoY

=
0 %

Progres

Capaian terhadap target Renstra 2024

-

Project Forest Investment Program (FIP1) : "Community Focussed-Investments to Address Deforestation and Forest Degradation" merupakan project hibah yang berfokus pada penguatan REDD+ berbasis masyarakat, dengan berinvestasi pada kegiatan-kegiatan REDD+ diantaranya perencanaan penggunaan lahan, pemantauan hutan dan masyarakat peduli api, regenerasi dan pemeliharaan hutan, serta pengembangan ekowisata.

Project ini didanai hibah dari *Climate Investments Fund* (CIF) yang disalurkan melalui *Asian Development Bank* (ADB) dengan nilai hibah USD 17.000.000 dan memiliki jangka waktu selama 5 tahun (2017-2022), dan diperpanjang sampai bulan Juni 2023.

Lokasi Project FIP1 di 17 Desa yang masuk dalam wilayah kerja 4 KPH di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Output dari project ini yaitu :

1. Percontohan REDD+ berfokus terhadap masyarakat responsif gender
2. Strategi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan secara efektif
3. Harmonisasi kebijakan fiskal di tingkat Sub-Nasional diselaraskan dengan kebijakan di tingkat Nasional



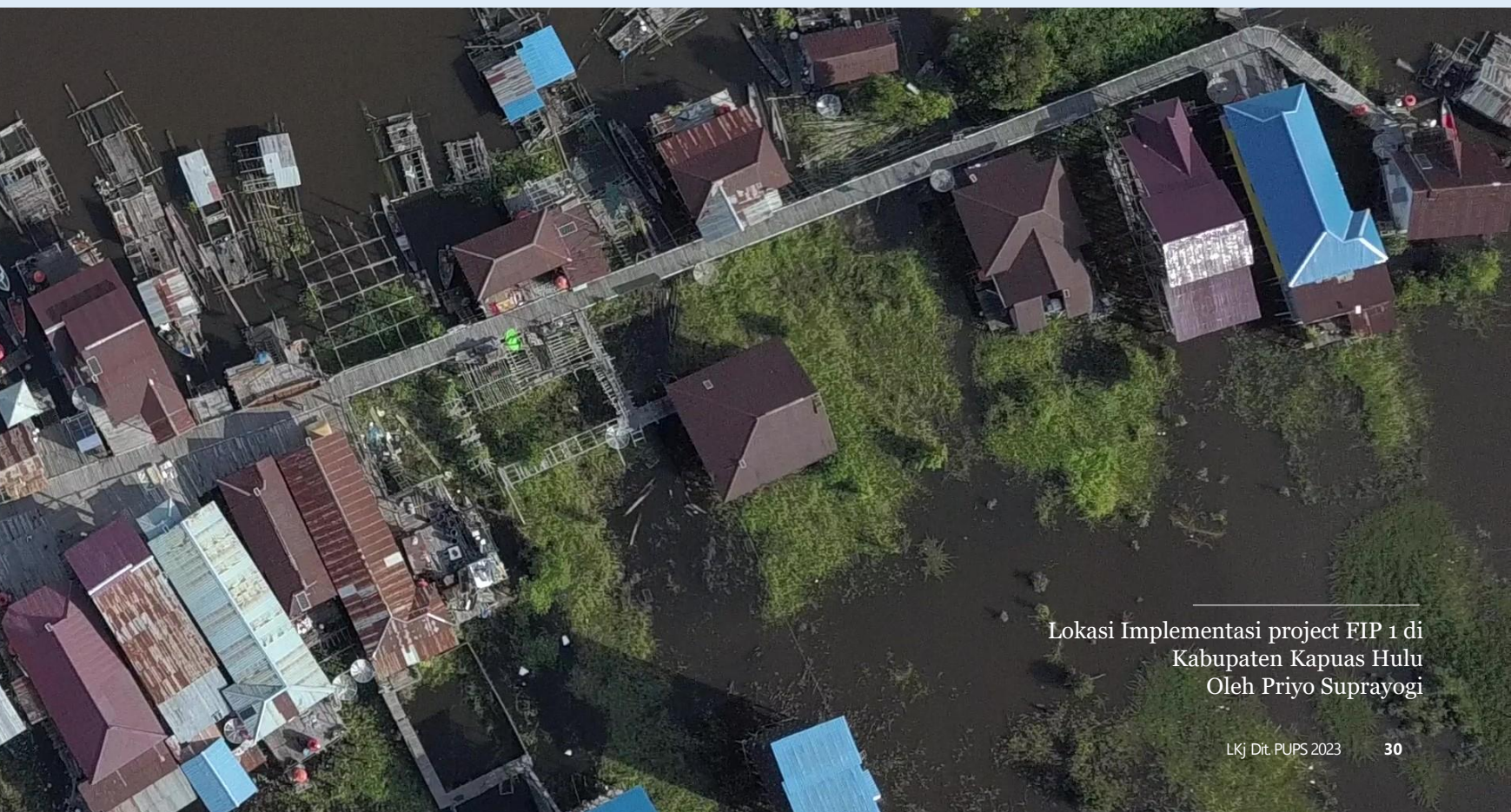
Dokumen

Project Completion
Report FIP 1



Capaian Project FIP1 antara lain yaitu :

1. Berkontribusi dalam penurunan emisi GRK sebesar 1,368 MtCO₂e
2. Berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 37% di Kabupaten Kapuas Hulu dan 47% di Kabupaten Sintang
3. Berkontribusi dalam tersusunnya 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat terkait pelaksanaan REDD+
4. Penanaman Agroforestry seluas 1.880 hektar
5. Pelaksanaan Assisted Natural Regeneration (ANR) seluas 4.500 hektar
6. Perlindungan kebakaran hutan dan lahan seluas 17.906 hektar
7. Penerbitan akses izin Perhutanan Sosial seluas 12.912,99 hektar
8. Pembangunan 34 sarana air bersih
9. Pembangunan 10 jalan tani desa
10. Pembangunan 2 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
11. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan staf pemerintah sebanyak 9.095 orang (termasuk perempuan 6.696 orang)
12. Pembangunan 5 unit rumah produksi
13. Pembangunan Galery Hasil Hutan di tingkat Provinsi
14. Pembangunan 2 unit persemaian



Lokasi Implementasi project FIP 1 di
Kabupaten Kapuas Hulu
Oleh Priyo Suprayogi

REALISASI ANGGARAN

Realisasi Berdasarkan OM SPAN

99,92%

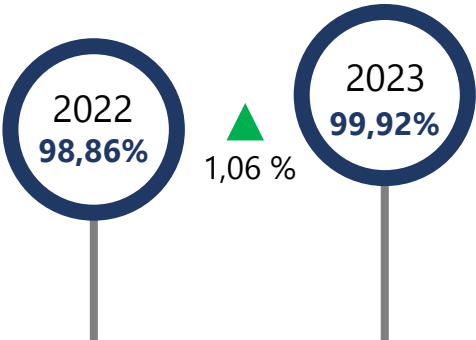


PAGU

REALISASI

Total anggaran Direktorat PUPS berdasarkan revisi pagu terakhir pada tahun 2023 sebesar Rp. 46.368.574.000. Anggaran tersebut selain bersumber dari APBN dan Hibah Luar Negeri dengan skema hibah terencana (Plant Grant). Sumber anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 33.627.741.000 (72,52%) dan HLN sebesar Rp. 12.740.833.000 (27,48%).

Apabila dinilai dari kinerja serapan anggaran Direktorat PUPS secara keseluruhan, maka capaian kinerja serapan anggaran juga menunjukkan performa yang cukup baik.



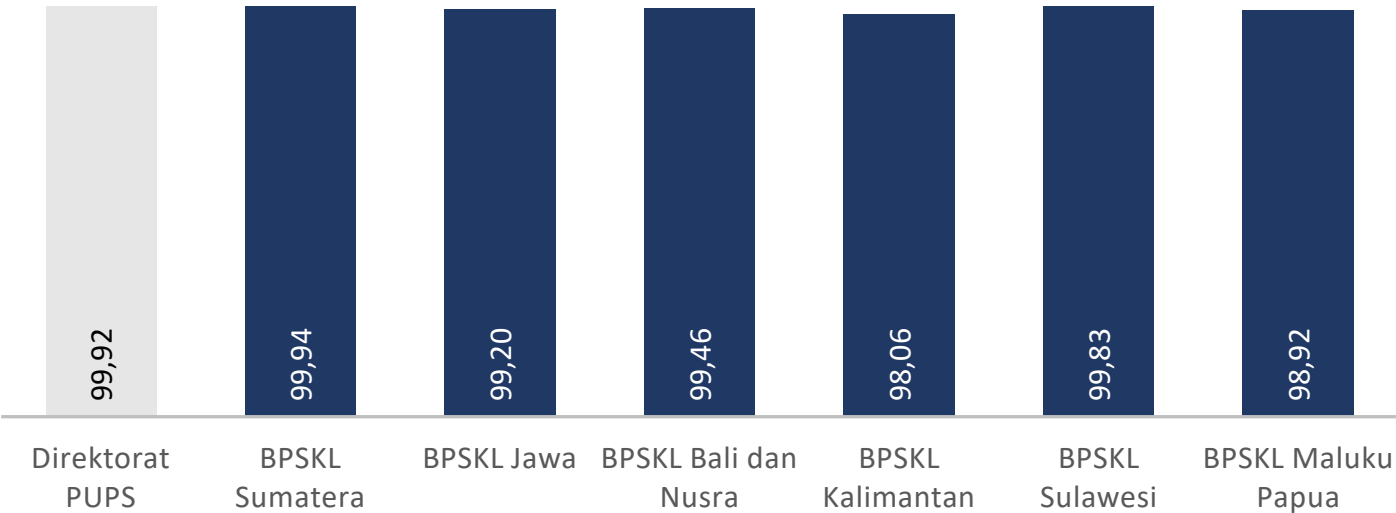
Capaian realisasi anggaran Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,06% dibanding Tahun 2022

Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	700.000.000	696.695.736	99,53
Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	200.000.000	198.152.622	99,08
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	1.051.741.000	1.048.864.898	99,73
FIP I	12.740.833.000	12.710.605.801	99,76
Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	31.676.000.000	31.675.841.700	100,00
TOTAL	46.368.574.000	46.330.160.757	99,92

Pencapaian Kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2023 dibantu aksinya melalui kegiatan BPSKL di seluruh Indonesia. Tabel dan grafik dibawah ini menjelaskan tentang anggaran dan realisasi kinerja balai dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Berdasarkan data realisasi, kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada setiap balai memiliki capaian yang baik, pencapaian tertinggi ada pada BPSKL Sumatera sebesar 99,94%.

Total kegiatan terkait kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebesar Rp. 61.836.374.683, anggaran ini terbagi untuk kegiatan investasi sebesar 55,78% dan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar 44,22%. Pada Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial yang miliki pagu 31,75% dari anggaran Direktorat Jenderal PSKL anggarannya terbagi untuk kegiatan investasi sebesar 69,36% dan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar 30,64%.

PERSENTASE REALISASI KEGIATAN PUPS 2023



UNIT KERJA	ANGGARAN PUPS (Rp)
Direktorat PUPS	46.330.160.757
BPSKL Sumatera	2.023.997.031
BPSKL Jawa	784.919.062
BPSKL Bali dan Nusra	1.441.428.744
BPSKL Kalimantan	2.733.581.549
BPSKL Sulawesi	7.077.087.020
BPSKL Maluku Papua	1.445.200.520

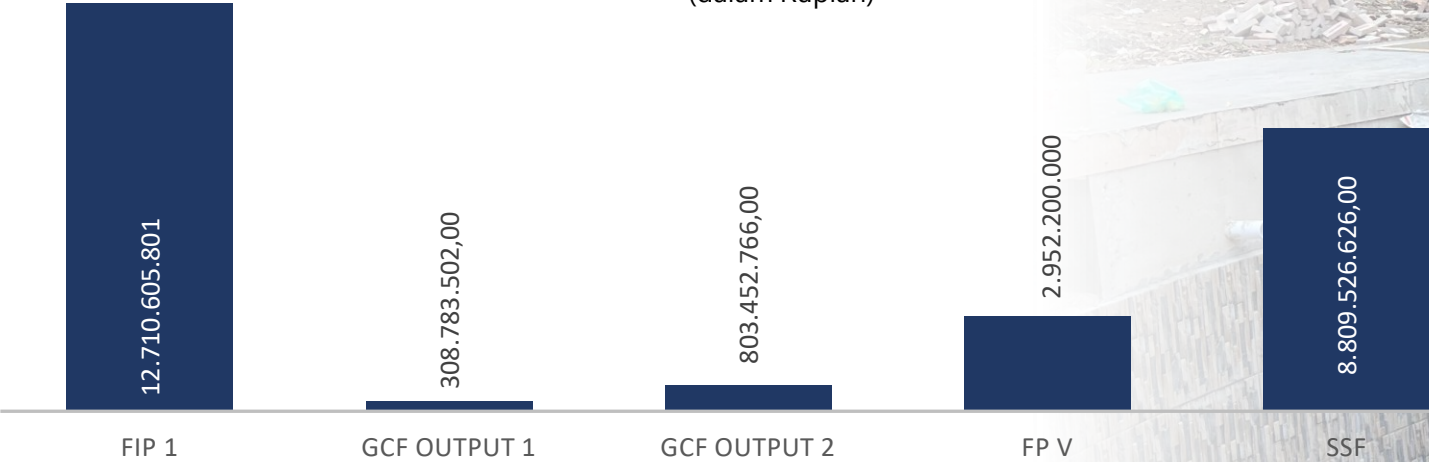
TOTAL PAGU KEGIATAN
PENGEMBANGAN USAHA
PERHUTANAN SOSIAL SEBESAR
RP. 61.836.374.683,
PAGU PUPS
31,75 %
DARI PAGU PSKL
PADA TAHUN 2023

DUKUNGAN NON APBN DAN HLN KEGIATAN PUPS TAHUN 2023

Capaian kinerja yang baik Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2023 tidak lepas dari bantuan hibah luar negeri (HLN) baik secara teregister dan tidak teregister dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Pada Tahun 2023 terdapat beberapa HLN yang turut serta membantu kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial antara lain *Forest Investment Program I (FIP I)*, *Green Climate Fund Output I* dan *II*, *Forest Programme V*, dan *Strengthening Social Forestry (SSF)*.

Pada Tahun 2023 total HLN yang membantu kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebesar Rp. 25.584.568.695. Rincian kegiatan yang dibantu oleh HLN adalah penyusunan dokumen IAD, supervisi penyusunan RKPS, fasilitasi peningkatan kelas KUPS, serta kegiatan dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial yang dirinci pada keterangan di bawah.

ANGGARAN HLN DALAM Mendukung KEGIATAN PUPS 2023 (dalam Rupiah)



RINCIAN DUKUNGAN HLN DALAM KEGIATAN PUPS

Penyusunan
2 Dokumen IAD,
Festival PeSoNa

Supervisi penyusunan RKPS, Temu Inovasi Perhutanan Sosial, Seller Meet Buyer, Penyusunan design dan kurikulum pelaksanaan RKPS partisipatif

Fasilitasi Penyusunan **62 RKPS**, Pelatihan Market Place, Diseminasi dan Sosialisasi IAD, Fasilitasi **peningkatan kelas 26 KUPS**

Fasilitasi Penyusunan
75 RKPS

Fasilitasi Penyusunan **204 RKPS**, Small Grant **122 KPS/ KUPS**, Penyusunan **5 Dokumen IAD**

ULASAN

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial TA. 2023 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial telah melebihi target APBN sebesar 200%, dikarenakan adanya bantuan anggaran Non APBN, sebagai wujud keberhasilan peran aktif dan partisipasi serta dukungan para pihak.

Output capaian kegiatan Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial yaitu Tersusunnya RKPS sejumlah 764 dokumen, Peningkatan kelas KUPS sejumlah 88 kelompok, Penyaluran alat ekonomi produktif sebanyak Penyaluran 50 kelompok, Bang PeSoNa sebanyak 590 kelompok, dan 9 rencana aksi IAD berbasis perhutanan sosial, serta penyelesaian project *Community Focused Investment to address deforestation and forest degradation Forest Investment Program I* (FIP I). Output tersebut merupakan output capaian bersama 6 (enam) wilayah BPSKL.

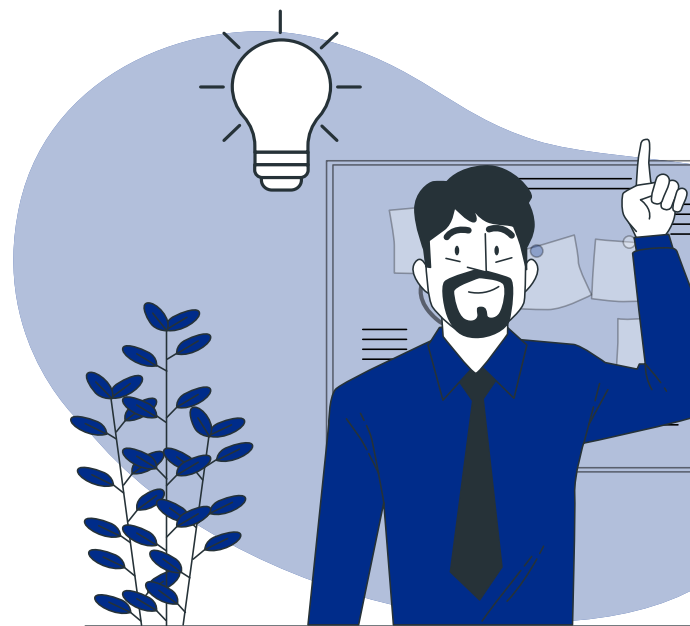
Capaian kinerja tersebut juga telah mendukung strategi dalam menjalankan Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN 2020 - 2024) yang tertuang dalam Indikator Kinerja Program yaitu meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebesar Rp. 61.836.374.683,- (Enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah). Realisasi anggaran yang terlaksana sebesar **99.92%**. Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada Balai PSKL Wilayah se Indonesia TA. 2023 rata - rata terealisasi sebesar **99,24%**. Berdasarkan data tersebut, Kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial berada pada kategori **SANGAT MEMUASKAN**.

TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, dapat direkomendasikan beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan, yaitu:

1. Pentingnya menyempurnakan perencanaan kegiatan untuk mendapatkan output capaian yang terukur dan dapat mendorong outcome dari Program Perhutanan Sosial.
2. Meningkatkan kualitas hasil kegiatan dengan strategi implementasi yang lebih akurat, sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal dan tepat sasaran.
3. Optimalisasi sumber daya manusia, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, diklat maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan lingkup Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan unit eselon dua lingkup Ditjen PSKL maupun unit eselon satu lingkup KLHK.
5. Sinergi dan kolaborasi program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga guna mendorong output kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.



STRATEGI DIT. PUPS 2024

Strategi pencapaian target output Tahun 2024, yang dapat dikembangkan, yaitu pada:

a) Aspek Perencanaan:

- Menyusun strategi dan perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output yang komprehensif, terdiri dari rencana kerja bulanan, triwulan, dan tahunan untuk mencapai output dan outcome program perhutanan sosial;
- Menyiapkan perangkat kebijakan pengembangan usaha perhutanan sosial dengan mengintegrasikan seluruh indikator kinerja kegiatan (IKK);
- Melakukan penyusunan lokus kegiatan bersama di awal tahun kegiatan berjalan dengan pelibatan para pihak baik internal KLHK maupun eksternal KLHK;
- Menyiapkan baseline data pada sistem informasi lingkup Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

b) Aspek Kelembagaan:

- Melegalkan perangkat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di lingkup Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mengingat saat ini adanya jabatan fungsional, sehingga penting untuk meningkatkan kinerja pegawai lingkup Direktorat PUPS;
- Peningkatan kapasitas SDM dapat berupa kegiatan pembinaan pegawai atau/dan mengikutsertakan personil dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan unit/instansi lain;
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit di lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan unit di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak terkait lainnya;

- Menerapkan pola mutasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan staf, sesuai dengan jabatan fungsional yang ada.

c) Aspek Pelaksanaan:

- Meningkatkan dan memanfaatkan SDM yang ada melalui pelaksanaan pelatihan dan pembinaan pegawai yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sesuai dengan bidang keahlian dan jabatan fungsionalnya;
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran kegiatan;
- Pentingnya sinergitas kegiatan antar Kementerian/Lembaga terkait Program dan Kegiatan dilingkup Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

d). Aspek Monitoring dan Evaluasi:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui permasalahan dan kendala sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan sebagai problem solver dari pelaksanaan program perhutanan sosial di lapangan;
- Membentuk tim evaluasi terpadu lintas kementerian/lembaga sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial terkait kegiatan teknis Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.
- Menatakelola digitalisasi data yang sudah ada sebagai sistem pencatatan informasi digital yang baik dan terbaru.

Demikian laporan kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2023. Saran, masukan maupun kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

PENUTUP

Kegiatan Bang Pesona di KTH Cikalapa, Desa Dewasari
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis
Provinsi Jawa Barat
Oleh Bhagas Van Salman Okpar

04

Capaian Tahun 2023 membaik buah manis kolaborasi

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebagai pemeran utama dalam aksi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang sudah memiliki persetujuan perhutanan sosial melalui fasilitasi kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan, IAD berbasis perhutanan sosial melalui kerjasama pengembangan usaha masyarakat.

Melalui dokumen laporan kinerja ini torehan manis kinerja Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada Tahun 2023 dapat digambarkan dengan perincian capaian kinerja dan anggaran Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja kepada Direktur Jenderal PSKL serta kepada publik.

Melihat dari realisasi anggaran dengan target pagu anggaran tahun 2023, penyerapan pada Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) lebih baik, terdapat peningkatan realisasi anggaran pada 2023 sebesar 99,92%, meningkat dari capaian Tahun 2022 sebesar 1,06%,

dengan capaian kinerja per Rincian Output (RO) mencapai 100% bahkan melebihi 100% berkat kinerja seluruh pegawai dan kolaborasi antar pihak dalam Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

Namun terdapat beberapa catatan bahwa target capaian strategis Direktorat PUPS tidak akan dapat dipenuhi melalui mekanisme penganggaran seperti biasa karena untuk mengejar capaian tersebut terdapat Gap capaian dan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu upaya terobosan dan inovatif telah dilakukan oleh Direktorat dan perlu dukungan oleh para pihak dalam implementasinya.

Selanjutnya kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan perbaikan atas kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 serta memberikan masukan korektif kepada para pihak sehingga dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan pada tahun 2024 dan masa yang akan datang.





ERIAN
GAN HIDUP
UTANAN
K INDONESIA

CLOSING FESTIVAL P



PeSoMa
7 Jun
Ged
Manggala V
laka



CEREMONY ESONA 2023

i 2023

lung
Wanabakti
an

Talkshow
& Podcast

Pameran
HUTSOS

Aneka

Temu Inovasi
Pesona
Pesona Show 2023

Pentas Budaya
& Hiburan



Festival PeSoNa adalah sebuah agenda tahunan dalam upaya meningkatkan sinergitas antara masyarakat, pemerintah, LSM, sektor swasta dan kaum milenial dalam percepatan Program Perhutanan Sosial untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan Festival PeSoNa yang diisi dengan berbagai kegiatan antara lain: Pemberian Penghargaan Kalpataru, Aneka Seminar dan Talkshow, Pameran Produk Hutan Sosial, Hiburan dan Pentas Budaya dan Kompetisi yang melibatkan kaum milenial.

Festival PeSoNa Tahun 2023 ini diselenggarakan pada tanggal 5 s.d 7 Juni 2023, acara ini akan dikemas dengan kekinian dan tidak melupakan budaya sehingga dapat menarik generasi muda untuk turut berpartisipasi serta akan menerapkan konsep "Reduce Waste Event Green Lifestyle" atau minimal sampah, melibatkan peran masyarakat seluas mungkin untuk memberikan gambaran visual kepada publik tentang pengelolaan sumber daya hutan khususnya pada program Perhutanan Sosial di Indonesia serta dapat dijadikan untuk mempertemukan para pelaku Perhutanan Sosial termasuk swasta serta masyarakat secara luas.

Dokumentasi oleh Aldi Vandista



Festival LIKE diselenggarakan pada 16-18 September 2023 di Indonesia Arena sebagai penyampaian informasi kepada publik terkait aktualisasi dan langkah-langkah korektif kebijakan Bapak Jokowi Widodo di sektor Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip kehutanan dan lingkungan hidup salah satunya keberpihakan kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk produktif melalui akses kelola hutan sosial. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial turut memeriahkan agenda ini dengan kegiatan workshop *"seller meet buyer"* untuk membantu kelompok usaha perhutanan sosial yang telah memiliki hasil produk memiliki kepastian pembeli melalui Kerjasama dengan perusahaan.





DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

